**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Oleh
Annie Myranika, Putri Khairunnisa*)
Universitas Islam Syekh-Yusuf

Abstrak

Pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu kesepakatan nasional, karena dalam hukum Islam tidak diatur masalah batas usia menikah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kasus Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur. Teorinya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7. Dari hasil penelitian menunjukkan hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak dan menghindari kemudharatan. Sedangkan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan adalah faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor menghindari zina khususnya bagi anak yang belum cukup umur.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi, Anak di Bawah Umur

A.PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu Sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹

Perkawinan harus dipahami sebagai usaha manusia untuk menyalurkan fitrahnya yakni berpasangan dengan memenuhi hasrat seksualnya secara benar dan halal. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Dari sini, diharapkan akan terjalin hubungan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab yang menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat. Dengan menikah, terbentuklah tatanan kehidupan bermasyarakat

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Syekh Yusuf

yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual, maupun sosial.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 13.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, terlebih lagi jika perkawinan berkaitan dengan hukum suatu Negara, perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

Ada banyak jenis perkawinan yang terjadi di masyarakat. Beberapa perkawinan terjadi karena “kecelakaan”. Beberapa perkawinan terjadi begitu saja, mengalir sebagai kelaziman hidup manusia. Beberapa perkawinan sepenuhnya dilaksanakan sesuai tuntunan syariat agama, tanpa melakukan penyimpangan dan pelanggaran, karena mengharapkan rida dan keberkahan dari Allah.

Perkawinan hukumnya dapat menjadi haram jika perkawinan tersebut diniatkan untuk menzalimi pasangan. Selanjutnya perkawinan hukumnya dapat menjadi

² *Ibid*, hlm. 15.

makruh jika perkawinan karena paksaan. Kemudian perkawinan juga dapat menjadi mubah apabila tidak ada kezaliman dan paksaan di dalamnya. Perkawinan dapat menjadi sunah tatkala kedua mempelai telah siap secara fisik, ilmu, mental/emosional, materi, dan agama.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur permasalahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada batasan usia yang diatur oleh negara dan agama. Mengenai usia yang layak untuk menikah, negara telah memiliki standar yang jelas mengenai usia bagi para calon pengantin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, batas usianya yaitu “19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.” Meskipun negara telah mengatur sedemikian rupa, tetapi ada saja kemungkinan seseorang yang ingin menikah dan belum mencapai batas usia yang telah ditentukan tersebut. Tentu saja harus dengan seizin orang tua/wali. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat jelas tercantum bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Adapun isi dari Pasal 26 ayat (1) butir c UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut:

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.³

Seperti yang telah diuraikan di atas, bukan negara saja yang mengatur mengenai batas usia bagi para calon mempelai, hukum Islam pun mengaturnya. Bila kedua calon mempelai telah balig, maka mereka bisa dinikahkan/dikawinkan. Dalam Islam pengertian balig itu berarti telah mencapai kedewasaan. Pada umumnya, usia balig bagi pria yaitu 15 (lima belas) tahun dan bagi wanita yaitu 9 (sembilan) tahun.

³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hlm. 131.

Usia anak yang telah sampai dewasa disebut fase balig, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Al-Ghazali, sebagai fase ‘*aqil*, tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.⁴

Di negara Indonesia, jika ada pasangan yang ingin menikah dan salah satunya belum mencapai batas usia yang telah diatur oleh negara atau dapat disebut belum cukup umur, maka perkawinan tersebut akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena instansi tersebut harus mematuhi peraturan yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, jika ada pihak yang ingin menikah di usia muda tidak serta merta gagal/tidak dapat menikah, melainkan untuk memenuhi keinginannya tersebut ia dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Banyaknya kasus pengajuan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur ini merupakan suatu kenyataan yang sangat menarik untuk dikaji, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi perkawinan dan faktor-faktor penyebab mengajukan permohonan izin dispensasi perkawinan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang marak terjadi dalam masyarakat.

Dari yang sudah diuraikan oleh penulis pada latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan, yang terdiri dari:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kasus Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur?

B. PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kasus

⁴ *Ibid*, hlm. 130.

Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng

Bahwa permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Kasus Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng merupakan pengajuan dispensasi yang sudah pernah diajukan oleh Pemohon atas rencana pernikahan anak kandung Pemohon di KUA Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Akan tetapi, pihak KUA menolak rencana pernikahan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur. Penolakan dari pihak KUA ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan bahwa pernikahan di bawah umur itu dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama, yang merupakan syarat-syarat administrasi. Oleh karena itu, Pemohon (yang merupakan ayah dari calon pengantin pria) mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 25 April 2018, kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa calon pengantin pria (anak Pemohon) dan calon pengantin wanita (calon istri) beragama Islam, maka Pengadilan Agama yang berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Pemohon telah mendaftarkan pernikahan untuk anak kandungnya ke KUA Cibodas Kota Tangerang, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang dan supaya terlebih dahulu mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tangerang.

Anak Pemohon telah memiliki suatu itikad baik dengan mendatangi persidangan dan telah memberikan suatu keterangan dalam persidangan, yang pada intinya anak Pemohon telah menjalin suatu hubungan dengan calon istrinya yang telah lama terjalin, dan memiliki niat melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Anak Pemohon juga telah bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

perbulan yang akan digunakan untuk menafkahi istrinya. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Mereka tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan persusuan, kecuali anak Pemohon yang baru berusia 18 tahun.

Majelis Hakim mempertimbangkan dari keterangan-keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan, lalu keduanya berencana akan melangsungkan pernikahan, mereka juga telah sama-sama siap untuk membina rumah tangga. Pemohon tetap akan melanjutkan rencana pernikahan anaknya dengan calon istri, walaupun Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi perkawinan, mereka tetap akan dinikahkan. Karena jika tidak dinikahkan, perkawinan menjadi tidak tercatat atau yang lebih sering disebut nikah siri.

Penolakan yang cukup beralasan dari KUA Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tersebut karena anak Pemohon dalam ketentuan undang-undang masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, majelis hakim berpendapat bahwa penolakan tersebut hanya bersumber pada kaidah umum undang-undang yang ada, yang mendasarkan kedewasaan hanya pada umur belaka. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tujuan dari pembatasan umur tersebut yaitu untuk menjamin hak-hak anak dapat dipenuhi dalam keadaan paling baik agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Majelis Hakim mengetahui jika memberikan dispensasi perkawinan kepada anak di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan sebenarnya akan berakibat kurang baik untuk pengoptimalan tumbuh dan kembang anak, karena hak-hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik, seperti kurangnya waktu bermain, berkreasi, dan bergaul dengan anak sebayanya. Akan tetapi di sisi lain berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Pemohon dalam pergaulan telah tampak dewasa dan hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah terlihat sebagaimana layaknya orang dewasa yang jika terus dibiarkan akan mengakibatkan mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa.

Majelis Hakim berpendapat, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam jika tidak menentukan batas umur pernikahan dalam syariat Islam. Manusia sendiri memandang pernikahan sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang mana tidak berdasarkan atas kematangan dan kecerdasan berpikir saja, melainkan dorongan biologis yang antara masing-masing orang berbeda-beda.

Majelis Hakim mengambil alih kaidah fikih “*Syaduzd Dzari’ah*” sebagai pendapat hakim yang inti dari artinya menyatakan mencegah suatu perbuatan yang menjurus pada yang dilarang adalah wajib hukumnya dan bahwa jika terdapat dua bahaya, maka pilihlah yang lebih ringan bahayanya dan mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik suatu kebaikan.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon dengan calon istrinya lebih kecil mudaratnya, daripada harus membiarkan mereka maksiat berkepanjangan yang akan menambah dosa.

Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam mengajukan dispensasi pernikahan untuk anak laki-laki dengan calon istrinya telah cukup beralasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan berdasar atas hukum dan dapat dikabulkan.

Jadi, menurut analisis penulis bahwa pertimbangan hakim sudah sangat memenuhi unsur keadilan. Dengan demikian, penulis sangat setuju dengan putusan hakim tersebut. Terutama pertimbangan hakim dalam mengambil kaidah fikih sebagai pendapat hakim yang mana menyatakan jika terdapat dua bahaya, maka pilihlah yang lebih ringan bahayanya dan dalam hal memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon lebih sedikit mudaratnya, meskipun memberikan dispensasi perkawinan kepada anak yang masih di bawah umur sebenarnya akan berakibat tumbuh kembang anak menjadi kurang optimal.

Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Diajukannya Dispensasi Perkawinan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Di dalam undang-undang tidak menyebutkan faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan. Di dalam Hukum Islam pun tidak dijelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diajukannya dis-

pensasi perkawinan, karena dalam Islam bila kedua calon mempelai telah balig, maka mereka sudah diperbolehkan untuk menikah.

“Batas usia perkawinan dalam Islam yaitu apabila telah balig, juga ada perbedaan usia balig menurut para ulama. Tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid.”⁵

Berikut ini penulis uraikan “faktor-faktor pada umumnya yang melatarbelakangi maraknya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama yang biasa terjadi dalam masyarakat. disebabkan oleh beberapa hal, yaitu.”⁶

1. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Orang tua pada zaman sekarang ini memiliki kekhawatiran lebih tinggi, karena makin banyaknya budaya barat yang masuk ke negeri ini. Sebagai orang timur kita harus selalu menjunjung tinggi adat ketimuran, sehingga norma-norma yang ada di negeri ini harus kita taati. Jangan sampai melanggar norma-norma yang sudah ada, karena bila melanggar pasti akan malu dan hidup bertetangga menjadi tidak nyaman, akan ada pembicaraan orang-orang yang tidak enak untuk didengar.

Kemajuan teknologi pun semakin canggih, kemajuan di era globalisasi pada masa kini semakin pesat. Media elektronik dan cetak turut berperan dalam membentuk karakter anak-anak Indonesia. Banyak para remaja yang mengikuti budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu hal-hal yang dianggap tabu seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan para remaja berhubungan layaknya suami istri. Hal itu biasanya terjadi karena mereka melihatnya dari media elektronik.⁷

Kekhawatiran orang tua semakin bertambah ketika melihat hubungan percintaan anaknya yang semakin intim. Orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti anaknya ataupun pasangan dari anaknya hamil terlebih dahulu sebelum menikah.

Dalam hal ini untuk menghindari hal-hal yang buruk, orang tua akan menikahkan anak mereka. Sebagaimana yang

⁵ *Ibid*, hlm. 125.

⁶ <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Juli 2019 jam 08.37 WIB

⁷ *Ibid*.

tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, jika anak mereka belum mencapai usia yang telah ditentukan undang-undang, maka orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.⁸

2. Faktor Ekonomi

Tingginya angka nikah muda salah satunya karena masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang rendah atau kesulitan ekonomi. Pernikahan di bawah umur memang marak terjadi karena kemiskinan. Orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁹

Ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, yang mereka korbankan biasanya adalah anak perempuan mereka yang masih di bawah umur. Anak perempuan diminta berhenti sekolah lalu mereka nikahkan dengan harapan dapat membantu ekonomi orang tua. Akan tetapi, tidak jarang anak perempuan mereka mendapat jodoh yang ekonominya tidak jauh berbeda, sehingga menambah kemiskinan baru.¹⁰

Di kalangan masyarakat kurang mampu agar beban hidup berkurang, mereka lebih memilih menikahkan anaknya. Hal tersebut yang menyebabkan atau mendorong orang tua untuk lekas menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan memintakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.¹¹

3. Hamil di Luar Nikah

Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak semestinya terjadi, karena di dalam ajaran agama Islam berpacaran saja dilarang, apalagi sampai melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Banyak orang ataupun anak muda yang belum menikah yang tidak lagi menjalani pedoman Islam yang seharusnya ditaati.

Mereka tidak mau mempedulikan aturan-aturan agama. Orang tua pun seharusnya berperan dalam mengingatkan anak-anaknya tentang aturan-aturan tersebut.¹²

Kondisi seperti ini sudah menjadi biasa di lingkungan masyarakat perkotaan yang dominan dipengaruhi oleh budaya barat. Pergaulan semakin bebas tanpa menghiraukan budaya kita yaitu budaya ketimuran. Mereka berpikir bah-

wa budaya barat itu keren. Jadi, budaya barat diambil mentah-mentah dan tanpa disaring terlebih dahulu.

Karena pergaulan bebas itulah banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Banyak anak perempuan di bawah umur terpaksa menikah karena mengalami kehamilan. Hamil di luar nikah juga disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya. Orang tua seringkali terlambat dalam mengingatkan anak-anaknya, barulah diingatkan ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak orang tua membiarkan anak-anaknya berpacaran, karena hal tersebut dianggap wajar. Akan tetapi, karena pergaulannya tidak diperhatikan, anak-anak mereka melakukan hal yang tabu tersebut. Bagi suami istri yang sah, memang kehamilan adalah hal yang membahagiakan, tetapi bagi pasangan yang belum menikah, kehamilan merupakan aib bagi keluarga dan masalah yang cukup serius.

Apabila terjadi kehamilan di luar nikah yang dialami oleh anak di bawah umur, upaya yang dapat dilakukan untuk menikahkan anak tersebut yaitu mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.¹³

4. Faktor Menghindari Zina

Seiring dengan perkembangan zaman, menjalin cinta lewat pacaran menjadi hal yang sangat wajar di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, pacaran dilarang oleh agama karena pacaran merupakan aktivitas yang mendekati zina. Pelarangan tersebut sudah secara tegas dituangkan dalam Alquran:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra [17]: 32)

Menurut analisis penulis, dewasa ini tidak sedikit anak muda yang mempelajari agama Islam lebih dalam dan sangat mematuhi aturan-aturan agama Islam, sehingga mereka tidak ingin mengikuti tren pacaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka, karena pacaran hanya menambah dosa dan mendekati zina. Walaupun tidak semua pacaran berujung zina, tetapi biasanya zina bermula dari pacaran.

Saat anak muda mulai mencintai lawan jenisnya dan sudah tidak mampu

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

untuk menahan hawa nafsunya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari zina adalah dengan menikah. Meski menikah bukan satu-satunya upaya untuk menahan hawa nafsu, tetapi hal tersebut merupakan hal yang benar menurut Islam dan dapat menghindari dosa dari aktivitas pacaran.

Selanjutnya sehubungan orang tua paham dan menjalankan aturan-aturan agama Islam dengan baik, dalam kasus ini sehingga pasti akan mendukung keputusan yang diambil oleh anaknya. Jika anak mereka belum cukup umur tetapi sudah balig, orang tua akan mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Jadi, menurut analisis penulis yang condong dengan alasan dalam kasus ini adalah faktor hamil di luar nikah dan karena adanya kekhawatiran orang tua yang melindungi status anak-anak yang akan melakukan perkawinan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam Kasus Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng yaitu tentang dikabulkannya permohonan dispensasi sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon/calon pengantin pria belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menghindari kemudahan, karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terlalu dekat sehingga sulit dipisahkan, bahkan calon istri telah dalam keadaan hamil 4 bulan, sehingga khawatir akan terjadi maksiat berkepanjangan. Selain itu, tidak ada larangan perkawinan baik sedarah, semenda, atau sepersusuan antara anak Pemohon dengan calon istrinya. Semua itu berkesesuaian antara berkas permohonan dengan keterangan para saksi yang dilakukan di bawah sumpah.

Faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor menghindari zina. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur syarat-syarat perkawinan yaitu mengenai usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, namun dikarenakan terlalu dekatnya hubungan antara anak Pemohon dispensasi dengan pasangannya yaitu bahwa adanya faktor perkembangan

zaman sehingga hamil di luar nikah. Maka, faktor yang terkait dengan kasus ini adalah faktor hamil di luar nikah.

Saran

- Perlunya dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 alasan-alasan dikabulkannya dispensasi perkawinan secara jelas, agar menjadi pedoman bagi hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan agar hakim dapat memberikan pertimbangan atau keputusan yang terbaik.
- Diharapkan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan tetapi mereka telah berzina dan telah hamil, maka harus terlebih dahulu melakukan *taubatan nasuha* atau tobat yang sebenar-benarnya tanpa mengulangi perbuatan dosa tersebut. Barulah mengajukan dispensasi perkawinan dan melangsungkan perkawinan.
- Dengan diketahuinya faktor-faktor pada umumnya yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan dalam masyarakat ini, seharusnya para remaja mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak seperti pemerintah, dengan harapan pemerintah dapat membantu dalam faktor ekonomi.
- Khususnya keluarga, terutama orang tua, diharapkan dapat menambah pendidikan di bidang agama lebih banyak dan agar lebih mengontrol pergaulan anak-anaknya sehingga tidak melanggar aturan agama maupun negara yang berlaku

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2017.
- Hamami, Taufiq. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa. 2013.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.

Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

_____, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Sumber Lain

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perkawinan/>

_____.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-57-20/2018-11-11-15-40-10/form-surat-permohonan-dispensasi-kawin

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

_____.wikipedia.org/wiki/Baligh

_____.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama

_____.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama

_____.wikipedia.org/wiki/Nikah_mutah

_____.wiktionary.org/wiki/nikah_tahlil

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/dampak-dispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia>

_____/repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67171/Chapter%20III-%20IV.pdf

_____/repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67171/Chapter%20II.pdf

_____/web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=29&sid=c713c96d-8fce-4269-8cf3-6069fd812682%40sdcv-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZW hvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=93595096